

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, manusia akan melewati setiap fase dalam kehidupannya. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga masa tua. Setiap fase yang ada tidak dapat ditolak oleh manusia. Salah satu fase kehidupan manusia yang akan dilewati adalah masa tua. Masa tua sering juga disebut dengan lansia. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

Berdasarkan hasil dari data Susenas tahun 2017, jumlah lansia di Indonesia mencapai 23,4 juta jiwa atau sekitar 8,97 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi yang mempunyai lansia dengan proporsi paling tinggi yakni 13,90 persen, diikuti dengan Jawa Tengah 12,46 persen, Jawa Timur 12,16 persen, Bali 10,79 persen dan Sulawesi Barat 10,37 persen. Badan Pusat Statistik memproyeksikan jumlah penduduk lansia pada tahun 2020 sebanyak 27,09 juta jiwa atau 9,99 persen dari jumlah penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2017)

Meningkatnya jumlah lansia dapat menjadi aset bangsa apabila para lansia dalam keadaan yang sehat dan produktif. Namun sebaliknya, lansia yang tidak mandiri dan dalam keadaan sakit akan berdampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi suatu bangsa (Ratnawati, 2017:8). Peningkatan jumlah lansia juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dimana pembangunan nasional yang peduli pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesehatan penduduk ditandai dengan peningkatan status gizi, layanan kesehatan, kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan pendidikan, yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya angka rata-rata usia harapan hidup penduduk (Suardiman, 2016: 5).

Tingginya jumlah lansia yang ada di Yogyakarta tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan pada lansia baik itu dari segi fisik, psikis, sosial maupun ekonomi. Secara fisik, lansia akan mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit.

Secara psikis, lansia dianggap merepotkan dan dianggap tidak dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Secara sosial, lansia kehilangan peran diri dan kedudukan sosialnya. Secara ekonomi, lansia dianggap sebagai beban keluarga karena sudah tidak dapat menghasilkan apa-apa lagi. Dengan adanya permasalahan-permasalahan dan anggapan-anggapan tersebut, dibutuhkan perhatian dari semua pihak untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lansia. Perhatian kepada lansia dapat ditunjukkan dengan memberikan perlindungan dan pembinaan agar lansia dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Melihat fenomena ini, perlindungan dan pemberdayaan lansia merupakan salah satu cara untuk membuat hidup para lansia lebih sejahtera.

Menurut Ife (dalam Anwas, 2014: 49) pemberdayaan adalah menyediakan sumber sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta ikut berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan lebih merujuk pada proses pemberian, yaitu memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat atau individu agar lebih berdaya (Suardiman, 2016: 29). Setelah terlaksananya pemberdayaan terhadap lansia, diharapkan akan mengurangi permasalahan-permasalahan terkait lansia. Karena dengan adanya pemberdayaan, para lansia akan aktif, produktif dan mandiri.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lansia maka pemerintah dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY menjalankan program pemberdayaan lansia yaitu Bina Keluarga Lansia atau disingkat dengan BKL. Bina Keluarga Lansia merupakan kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan, pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya (BKKBN, 2011: 10). Dalam program BKL sendiri didapati adanya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan, diantaranya: kegiatan keagamaan, kegiatan hidup sehat, dan kegiatan ekonomi produktif.

Deliveri (dalam Rinawati, 2009: 35) menyebutkan proses pemberdayaan masyarakat harusnya didampingi oleh suatu tim fasilitator yang mengerti tentang berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Tim fasilitator yang memiliki peran sebagai pendamping ini merupakan salah

satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat. Fasilitator sering juga disebut sebagai *agent of change* ataupun *agent of empowerment*. Lippit dan Rogers (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2017: 139) menyebutkan bahwa fasilitator sebagai agen perubahan (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi.

Dalam perkembangannya, fasilitator hanya berperan sebagai penyampai inovasi dan memberi pengaruh kepada penerima manfaat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi ia juga harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang diwakili dengan masyarakatnya, maupun untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah/lembaga pemberdayaan yang bersangkutan (Mardikanto dan Soebiato, 2017: 140).

Komunikasi kemudian berperan penting untuk mengukur keberhasilan fasilitator dalam sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Saat menyampaikan inovasi ataupun informasi misalnya, tentu fasilitator perlu memperhatikan tata cara berkomunikasi. Hal ini diperlukan agar nantinya pesan yang disampaikan menjadi efektif dan dapat diterima oleh penerima manfaat. Begitupun dalam mempengaruhi para penerima manfaat dalam proses pengambilan keputusan, fasilitator harus mampu menyakinkan para penerima manfaat terhadap keputusan yang diambilnya. Dengan terjalannya komunikasi yang baik, besar kemungkinan sebuah kegiatan pemberdayaan menjadi berhasil.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran BKKBN DIY sebagai fasilitator dalam sebuah program pemberdayaan lansia, komunikasi seperti apa yang dilakukan oleh fasilitator sehingga program yang dijalankan menjadi berhasil. Berangkat dari visi BKKBN yaitu menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, serta misinya yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan kependudukan dan memfasilitasi pembangunan keluarga membuat penulis tertarik untuk menjadikan BKKBN sebagai objek penelitian. Terlihat bahwa BKKBN merupakan lembaga yang memang berfokus pada pembangunan kependudukan. Kenapa BKKBN DIY? Hal ini didasari pada data yang tersedia bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan lansia paling tinggi di Indonesia. Pada penelitian ini,

peneliti menjadikan kelompok Bina Keluarga Mugi Waras sebagai studi kasus penelitian dikarenakan kelompok ini adalah kelompok yang dijadikan sebagai *Center Of excellent* oleh BKKBN. Di Indonesia sendiri, BKL Mugi Waras merupakan kelompok yang pertama kali dijadikan sebagai *Center Of Excellent* dikarenakan kegiatan dan prestasinya yang sangat banyak.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, BKL Mugi Waras memiliki segudang prestasi diantaranya: Juara I BKL Tingkat Kabupaten Sleman Tahun 2014, Juara I BKL Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, Juara II BKL Tingkat Nasional Tahun 2014, Piagam Penghargaan dari Gubernur DIY sebagai Pengelola Lansia Terbaik Tahun 2017, Piagam Penghargaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia pada Tanggal 5 Juli 2018 sebagai Pengelola Terbaik Tingkat Nasional. Saat ini BKL Mugi Waras sudah menjadi *Center Of Excellent* (COE) yang artinya BKL ini dapat dijadikan sebagai kiblat dalam kegiatan pemberdayaan lansia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BKKBN DIY sebagai fasilitator dalam program Bina Keluarga Lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BKKBN DIY dalam melaksanakan program Bina Keluarga Lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BKKBN DIY sebagai fasilitator dalam program Bina Keluarga Lansia yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BKKBN DIY program Bina Keluarga Lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran fasilitator dalam sebuah program pemberdayaan lansia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi BKKBN DIY sehingga dapat mengevaluasi kinerja kedepannya dan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan peran fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan lansia.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, jurnal yang disusun oleh Siti Aminatun dan Chulaifah (2015). Judul dari penelitian ini ialah **“Peran Pekerja Sosial dalam Memberi Pelayanan Lanjut Usia”**. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap lanjut usia. Penelitian ini ingin melihat apakah pekerja sosial kemudian dibutuhkan untuk meminimalisir ketelantaran para lanjut usia. Data yang didapatkan dari penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Metode penelitian yang dilakukan ialah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial berperan dalam memberikan pelayanan sosial terhadap lanjut usia. Lansia mendapatkan kepuasan secara psikologis dengan pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial sehingga lansia menjadi bahagia dan terhindar dari keterlantaran. (Aminatun, dan Chulaifah, 2015)

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada program dan objek yang diteliti. Penelitian diatas membahas tentang bagaimana pekerja sosial dalam memberi pelayanan kepada lansia sedangkan penulis membahas tentang bagaimana fasilitator didalam sebuah program pemberdayaan lansia. Objek dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis juga berbeda. Penelitian diatas menjadikan Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta sebagai objek sedangkan penulis menjadikan BKL Mugi Waras sebagai objek. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang peran fasilitator atau pekerja sosial dalam sebuah program yang bertujuan untuk mensejahterakan lanjut usia.

Kedua, jurnal yang disusun oleh W.Widada, Asmuji, D. Indriyani dan A. Joyowidono pengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember dan pekerja di

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (2013) dengan judul **“Pemberdayaan Kelompok Lansia Melalui Optimalisasi Peran Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”**. Penelitian ini membahas tentang bagaimana optimalisasi peran kader pada posyandu lansia yang nantinya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kader sehingga nantinya kelompok lansia akan dapat lebih mandiri dalam meningkatkan status kesehatannya dengan dukungan kader tadi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ada 104 lansia yang rutin menghadiri kegiatan posyandu lansia dalam 3 bulan. Setelah adanya optimalisasi peran kader posyandu lansia, 20 anggota keluarga meningkatkan partisipasi untuk ikut mengoptimalkan kesehatan lansia (Widada, W., Asmuji, D. Indriyani, dan A. Joyowidono, Jurnal, 2013).

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada program dan objek yang diteliti. Penelitian diatas membahas tentang pemberdayaan kelompok lansia dengan mengoptimalkan peran kader posyandu lansia dengan menjadikan kelompok lansia yang ada di kecamatan sukorambi sebagai objek sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis membahas tentang peran seorang fasilitator dalam program Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan menjadikan BKL Mugi Waras sebagai objek penelitian. Persamaan kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang peran kader atau fasilitator dalam sebuah kelompok pemberdayaan lansia.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Nurrita Widyakusuma (2013) dengan judul **“Peran Pendamping dalam Program Pendampingan dan Perawatan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga (*Home care*): Studi Tentang Pendamping di Yayasan Pitrah Sejahtera, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara”**. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pendamping dalam meningkatkan keberfungsian sosial lanjut usia dalam program pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga (*home care*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping menjalankan peran sebagai pemungkin, penggerak, mediator, dan motivator. Didapatkan bahwa peran yang dijalankan oleh pendamping sudah dijalankan dengan baik, meskipun ada beberapa peran yang akhirnya tidak dijalankan oleh pendamping. Dari penelitian ini juga didapatkan kendala selama

program dijalankan yakni jumlah honor yang diterima oleh pendamping dirasa belum layak dan juga kurang meratanya kesempatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk pendamping (Widyakusuma, Jurnal, 2013).

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada program dan objek yang diteliti. Penelitian diatas membahas tentang program pemberdayaan lansia berupa home care dengan menjadikan yayasan pitrah sebagai objek dari penelitiannya sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis membahas tentang program pemberdayaan berupa Bina Keluarga Lansia dengan menjadikan BKL Mugi Waras sebagai objek penelitian. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai peran pendamping atau fasilitator dalam sebuah program pemberdayaan lansia.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Afiyatur Rosidah, Lusiana Devika F.S dan Rifqi Firda S Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Malang (2016) yang meneliti tentang **“Pemberdayaan Lansia Melalui Karang Werda di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar”**. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kesejahteraan hidup lansia dari segi fisik maupun segi materil setelah adanya karang werda di lingkungannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum adanya karang werda di lingkungannya, para lansia tadi kurang diperhatikan oleh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Setelah adanya karang werda para lansia merasa kesejahteraan hidupnya terjamin. Hal tersebut dirasakan karena adanya bantuan berupa fasilitas pelayanan kesehatan secara gratis dan pemberian berupa bahan pokok yang diadakan secara berkala setiap bulannya (Rosidah, Devika F.S, dan Firda S, Jurnal, 2016).

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada tema dan objek yang diteliti. Penelitian diatas membahas tentang kesejahteraan hidup lansia dari segi fisik maupun segi materil dengan adanya karang werda dan menjadikan Desa Nglegok sebagai objek, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang peran fasilitator dalam program BKL dan menjadikan BKL Mugi Waras sebagai objek penelitian. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas pemberdayaan lansia.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Ramadhani Bondan Puspitasari dan Arsiyah mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2015) dengan judul **“Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Lanjut Usia di Kabupaten Sidoarjo”**. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan lansia di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah pemerintah sudah berperan dalam pemberdayaan lanjut usia yang meliputi beberapa kegiatan, diantaranya: pemberdayaan dalam pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pemberdayaan pelayanan kesehatan, pemberdayaan pelatihan keterampilan, pemberdayaan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, dan pemberdayaan bantuan sosial. Dari penelitian ini juga didapatkan faktor pendukung peran pemerintah dalam pemberdayaan lansia yaitu diadakannya kegiatan posyandu lansia, senam lansia, bantuan sosial dan adanya sumber daya manusia yang membuat lansia dapat dan mampu diberdayakan. Sedangkan faktor penghambat peran pemerintah dalam pemberdayaan lanjut usia ialah belum adanya koordinasi antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; Dinas Kesehatan; dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB), kurang validnya pendataan lansia di tingkat desa maupun kelurahan, serta kurangnya kesadaran lansia tentang pentingnya pemberdayaan untuk kehidupan mereka (Puspitasari dan Arsiyah, Jurnal, 2015)

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada objek yang dikaji. Penelitian diatas menjadikan lansia yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebagai objek, sedangkan penulis menjadikan lansia BKL Mugi Waras sebagai objek. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas peran fasilitator (pemerintah) dalam menjalankan program pemberdayaan lansia.

F. Kerangka Konsep

1. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat

a. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Menurut Djohani (dalam Anwas, 2014: 49) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak

yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang telah berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan.

Pengertian pemberdayaan masyarakat juga dijelaskan oleh Sumodiningrat (dalam Theresia, *et al.*, 2015: 122) mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk memberikan kesempatan dan juga untuk memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk membantu kelompok miskin tadi dalam memajukan dan mengembangkan usahanya, dengan maju dan berkembangnya usaha mereka maka akan terjadi perbaikan pendapatan perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memberikan fasilitas dan menggerakkan masyarakat untuk mampu menempatkan diri secara seimbang dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang (Rinawati, 2009: 34).

b. Tahapan pemberdayaan masyarakat

Tahapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (dalam Rinawati, 2009: 39) dimulai dari tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.

1. Tahap penyadaran

Dalam tahapan penyadaran ini masyarakat diberi pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk melakukan perubahan pada dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Tahap penyadaran ini bertujuan agar masyarakat mempunyai “sesuatu”.

2. Tahap pengkapasitasan

Proses ini sering disebut sebagai proses “memampukan” (*capacity building*). Proses pengkapasitasan, dilakukan atas tiga hal, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Dalam proses pengapasisan kepada manusia ini masyarakat diberikan

pembelajaran sehingga mereka mempunyai kecakapan (*skilfull*). Sementara pengapaspitasan terhadap organisasi dilakukan melalui restrukturasi.

3. Tahap pendayaan

Tahap terakhir dari proses pemberdayaan adalah memberikan “daya” (*empowerment*) itu sendiri. Dalam proses ini masyarakat diberikan daya, kekuasaan, dan otoritas.

c. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan, diantaranya sebagai berikut:

1) Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Perbaikan yang dilakukan pada sebuah kegiatan atau tindakan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring mitra usaha.

2) Perbaikan usaha (*better business*)

Meliputi perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3) Perbaikan pendapatan (*better income*)

Pembenahan bisnis yang dilakukan diharapkan juga dapat membenahi pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

4) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Pembenahan pendapatan diharapkan juga dapat membenahi lingkungan baik secara fisik maupun sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5) Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat menjadikan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat juga menjadi lebih baik.

6) Perbaikan masyarakat (*better community*)

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

d. Pengembangan masyarakat

Pengembangan masyarakat (PM) adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dan pengembangan masyarakat juga menekankan pada prinsip partisipasi sosial (Suharto, 2005: 37).

Conyers dalam Nasdian (2015: 32) menyatakan:

“Istilah pengembangan masyarakat (community development) sudah digunakan secara internasional dalam arti sebagai proses, yakni semua usaha swadaya masyarakat yang digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi masyarakat dalam berbagai, antara lain: bidang ekonomi, sosial, dan kultural serta untuk menyatukan seluruh masyarakat ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa.”

Mengutip pendapat Twelvetrees dalam Suharto (2005: 38), mengatakan bahwa PM adalah *“ the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions”*. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa PM merupakan sebuah proses untuk membantu orang biasa dalam meningkatkan komunitas mereka sendiri dengan melakukan tindakan kolektif.

Karena terdapat beragam pandangan tentang community development, Lee Cary dalam Nasdian (2015: 37) menyatakan:

“Meskipun tidak ada definisi yang dapat diterima secara luas, beberapa elemen atau aspek community development yang selalu muncul dari beragam pengertian tersebut dan dapat diterima oleh berbagai pihak antara lain: (1) komunitas dipandang sebagai unit aksi; (2) inisiatif dan kepemimpinan dalam komunitas sebagai sumber daya; (3) menggunakan sumber daya internal dan eksternal; (4) partisipasi semua warga komunitas; (5) pendekatan komprehensif yang diorganisir dengan melibatkan seluruh warga komunitas; dan (6) demokratis, rasional, tugas yang menyeluruh.”

2. Pemberdayaan Lansia

Pemberdayaan penduduk usia lanjut mengacu pada upaya mengembangkan daya (potensi) individu maupun kolektif penduduk usia lanjut sebagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun politis (Suardiman, 2006: 27).

Mengutip pendapat Pranarka dan Moelyoto dalam Suardiman (2006: 27) menyebutkan, dalam melakukan pemberdayaan (*empowerment*) terlebih dahulu perlu dipahami dua hal, yaitu *power* dan *empowerment*. *Power* adalah bagaikan bangunan dasar, sedangkan *empowerment* adalah bagaikan bangunan atasnya. Dengan demikian, *empowerment* perlu dilandasi *power*. Dalam pemberdayaan penduduk usia lanjut potensi objektif usia lanjut diibaratkan merupakan *power* yang dijadikan dasar pemberdayaan.

Usia lanjut bukan objek, tapi subjek yang berdaya. Pemberdayaan menempatkan lansia pada potensi apa yang bisa dikembangkan dan dilakukan oleh mereka bukan pada apa yang bisa diperuntukkan bagi lansia. Bukan semata-mata apa yang bisa dilakukan oleh pihak luar bagi usia lanjut, tetapi lebih kepada apa yang bisa dilakukan oleh usia lanjut sendiri. Perlu digali daya apa yang bisa dimunculkan dan diberdayakan dari usia lanjut menuju kepada suatu aktivitas riil. Upaya memberdayakan usia lanjut dapat dikatakan berhasil apabila dirasakan manfaatnya oleh lansia itu sendiri.

3. Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat

Komunikasi pemberdayaan masyarakat adalah usaha yang dilakukan oleh para pelaku pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin serta mempertimbangkan seluruh elemen pemilihan komunikator (penyuluh/fasilitator), Pesan (Pendidikan), Saluran, Komunikan (Masyarakat) serta Feedback (umpan balik)

a. Komunikator

Komunikator dalam komunikasi pemberdayaan biasanya disebut dengan fasilitator/penyuluh. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalkikan jalannya komunikasi. Untuk itu, seorang komunikator harus terampil berkomunikasi, dan juga kayak ide serta penuh daya kreativitas (Cangara, 2015: 99)

b. Pesan

Dalam komunikasi pemberdayaan, pesan merupakan informasi yang didapatkan dari hasil diskusi fasilitator dan masyarakat dengan mengusung *mutual understanding* dan metode *bottom up*.

c. Saluran

Saluran dalam komunikasi pemberdayaan adalah media yang digunakan dalam proses memberikan daya kepada masyarakat.

d. Komunikasikan

Komunikasikan dalam komunikasi pemberdayaan merupakan komunitas yang sesuai dengan konsep tipologi komunitas atau obyek pemberdayaan masyarakat.

e. Feedback

Feedback merupakan proses *mutual understanding* (MU) dalam proses pemberian daya pada masyarakat.

4. Fasilitator dalam pemberdayaan lansia

a. Pengertian fasilitator

Deliveri (dalam Rinawati, 2009: 35) mengatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat harusnya juga didampingi oleh suatu fasilitator yang bersifat multidisiplin. Fasilitator sebagai pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam kegiatan pemberdayaan. Peran tim pendamping akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.

Lippit dan Rogers (dalam Theresia, *et al.*, 2015: 174) menyebut fasilitator sebagai agen perubahan (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi.

Barker (dalam Suharto, 2005: 98) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

b. Ragam penyuluh/fasilitator

Berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja, fasilitator dibedakan dalam beberapa bagian (UU No. 16 Tahun 2006), diantaranya:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai Penyuluh/Fasilitator.
- 2) Penyuluh/Fasilitator Swasta, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta (produsen pupuk, pestisida, perusahaan benih/benih/alat/mesin pertanian, dll). Termasuk dalam kategori penyuluh swasta adalah penyuluh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 3) Penyuluh/Fasilitator, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat yang sukarela (tanpa imbalan) melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya.

c. Peran Penyuluh/Fasilitator

Menurut Levin (dalam Mardikanto dan Soebinto, 2017: 140) ada tiga macam peran penyuluh yang terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- 1) Pencairan diri dengan masyarakat sasaran.
- 2) Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan.
- 3) Pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran.

Lebih lanjut, Mardikanto (dalam Theresia, *et al.*, 2015: 178) menyampaikan peran penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat yang disebutnya sebagai edfikasi, yaitu akronim dari:

- 1) Peran edukasi, yaitu fasilitator berperan sebagai pendidik dalam arti untuk mengembangkan bersama penerima manfaatnya, dan terus menanamkan pentingnya belajar sepanjang hayat kepada masyarakat penerima manfaatnya.
- 2) Peran diseminasi inovasi, yaitu peran penyebarluasan informasi/inovasi dari “luar” kepada masyarakat penerima manfaatnya, atau sebaliknya; dan dari sesama warga masyarakat kepada warga masyarakat yang lain (di dalam maupun antar sistem sosial yang lain).

- 3) Peran fasilitasi, fasilitator disini berperan sebagai pemberi kemudahan dan menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain.
- 4) Peran konsultasi, yaitu fasilitator berperan sebagai penasehat atau pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaatnya dan pemangku kepentingan yang lain.
- 5) Peran advokasi, fasilitator berperan untuk memberikan bantuan yang berkaitan dengan rumusan/pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat penerima manfaat (terutama bagi kelompok kelas-bawah).
- 6) Peran supervisi, fasilitator berperan sebagai supervisor pelaksanaan kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan dan atau dilaksanakan oleh masyarakat penerima manfaat.
- 7) Peran pemantauan (monitoring) dan evaluasi, fasilitator berperan untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan penilaian atas proses dan hasil-hasil pemberdayaan masyarakat, baik selama kegiatan berlangsung maupun pada saat sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan.

d. Kualifikasi Penyuluh/Fasilitator

Setelah melihat peran-peran yang harus dijalankan oleh penyuluh/fasilitator, Berlo (dalam Soebiato dan Mardikanto, 2017: 143) mengemukakan ada empat kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluh/fasilitator, antara lain:

1) Kemampuan berkomunikasi

Dalam poin ini, yang terpenting ialah kemampuan dan keterampilan penyuluh/fasilitator untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaatnya.

2) Sikap penyuluh/fasilitator, yang:

- a) Menghayati dan bangga terhadap profesinya, serta merasakan bahwa kehadirannya untuk melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat itu memang sangat dibutuhkan masyarakat penerima manfaatnya.
- b) Meyakini bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji kemanfaatannya.

- c) Menyukai dan mencintai masyarakat penerima manfaatnya.
- 3) Kemampuan pengetahuan penyuluh/fasilitator tentang:
- a) Isi, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan.
 - b) Latar belakang dan keadaan masyarakat penerima manfaatnya.
 - c) Segala sesuatu yang seringkali menyebabkan warga masyarakat suka atau tidak menghendaki terjadinya perubahan maupun segala sesuatu yang menyebabkan masyarakat seringkali cepat/lambat mengadopsi inovasi.
- 4) Karakteristik sosial-budaya penyuluh/fasilitator
Keadaan latar belakang sosial-budaya (bahasa, agama, kebiasaan-kebiasaan) seringkali justru lebih banyak menentukan keberhasilan penyuluhan yang dilaksanakan.
- e. Kunci keberhasilan penyuluh/fasilitator
Menurut Rogers (dalam Theresia, *et al.*, 2015: 187) mengemukakan ada empat hal yang menjadi kunci keberhasilan penyuluh/fasilitator, yaitu:
- 1) *Change-agent efforts* atau kerja keras yang dilakukan oleh penyuluh/fasilitator.
 - 2) *Client Orientation* atau selalu mengacu kepada (keadaan, masalah, dan kebutuhan) penerima manfaat.
 - 3) *Compatibility with client's needs* atau harus menyesuaikan kegiatannya dengan kebutuhan penerima manfaat.
 - 4) *Empathy* atau bertenggang rasa, yaitu kemampuan memahami, merasakan, dan menempatkan diri sebagai penerima manfaatnya.

5. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis yang bisa digunakan untuk mengukur S = *Strengths* (kekuatan-kekuatan yang dimiliki), W = *Weakness* (kelemahan yang ada), O = *Opportunities* (peluang-peluang yang mungkin bisa diperoleh), dan T = *Threats* (ancaman-ancaman yang bisa ditemui) (Cangara, 2014: 106).

Dari empat komponen ini, komponen kekuatan dan kelemahan berada dalam ranah internal organisasi. Kedua komponen ini erat hubungannya dengan sumber daya dan

manajemen organisasi, karena itu disebut sebagai asesmen internal organisasi. Sedangkan komponen peluang dan ancaman berada dalam ranah eksternal organisasi.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini ialah paradigma konstruktivisme. Hidayat (dalam Salim, 2001: 42) menjelaskan bahwa paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap “*socially meaningful action*” melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku social dalam setting kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku social bersangkutan menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. . Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Jenis penelitian berupa data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2011:4).

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung sejak November 2018 sampai dengan April 2019. Lokasi penelitian terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, di kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Beralamat di Jl. Kenari No.58, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

4. Narasumber Penelitian

Pemilihan narasumber pada penelitian ini dijalankan dengan purposive sampling, artinya pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya memilih seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan, atau seseorang yang memiliki kekuasaan dalam kelompok tersebut sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi narasumber ialah Kepala Subbidang Bina Keluarga Balita, Anak & Ketahanan Keluarga Lansia, Widyaiswara, Penyuluh KB (PLKB) Kecamatan Moyudan dan Ketua BKL Mugi Waras.

5. Teknik pengumpulan data

Sugiyono (2008: 225) menjelaskan pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

1) Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, hasil observasi dan wawancara menjadi bagian dari hasil sumber data primer.

2) Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

6. Teknik Analisis Data

Analisi data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2007: 248).

Sugiyono (2008: 247) menyebutkan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam analisis data, yaitu:

1) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya.

3) Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

